

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Demokrasi memang bukan hal yang pasti dalam memajukan suatu negara, tidak semua negara demokrasi mengalami perkembangan yang signifikan dalam mencapai kemakmuran. Tetapi India, negara yang merdeka pada tahun 1947 dan sejak saat itu menganut sistem demokrasi telah mengalami kesuksesan dalam menjalankannya hingga sekarang. Bahkan India merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dengan perkembangan perekonomian yang cukup dipandang dunia.

Perjalanan demokrasi India dimulai pada tahun 1950, dengan janji untuk mengamankan semua warganya dengan cara adanya keadilan sosial, ekonomi dan politik, kebebasan berfikir, berekspresi, keyakinan, iman dan ibadah, serta persamaan status dan kesempatan¹. Pemilihan umum pertama kali dilakukan di India pada tahun 1952 dengan perdana menteri Jawaharal Nehru yang bersifat sosialis dan memiliki sistem demokrasi prosedural². Kemudian digantikan oleh Indira Gandhi pada tahun 1966-1977 yang lebih dapat memperkuat demokrasi³. Indira melakukan liberalisasi dengan

¹K.C. Suri, *An ASEAN Barometer Conference on The State of Democratic Governance in Asia, The State of Democratic Governance in India*

<http://www.asianbarometer.org/newenglish/publications/conferencepapers/2008conference/sec.6.1.pdf> diakses pada 1 Desember 2013.

²Miguel Angel Lara Otaola, *Democracy in India, to Avoid "a Million Mutines"*
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N72/Varia_72/24_Lara_72.pdf diakses pada 3 Desember 2013.

³Philip Oldenburg, *India's Democracy: Illusion or Reality*
<http://www.asianstudies.org/aaa/Oldenburg-12-3.pdf> diakses 4 November 2013.

usaha mengentaskan kemiskinan, membantu orang-orang miskin dengan memberikan bantuan modal, tetapi setelah itu India mengalami krisis dan Indira Gandhi turun jabatan, pada tahun 1980 Indira Gandhi mencalonkan diri lagi sebagai Perdana Menteri dan mencoba untuk mewujudkan demokrasi liberal⁴.

Tetapi di balik kesuksesan demokrasi tersebut, stratifikasi sosial yang melekat pada agama Hindu di India masih ada, kebanyakan politisi berasal dari kasta atas terutama pada perempuan. Dengan adanya demokratisasi seharusnya seluruh rakyat mencapai kebebasannya. Demokrasi sendiri, menurut Abraham Lincoln didefinisikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat⁵. Kebebasan merupakan bagian dari demokrasi, antara lain kebebasan bersuara, hak asasi manusia, dan persamaan di depan hukum.

India masih mengalami tantangan dalam perjalanan menuju negara yang benar-benar demokrasi karena masih banyaknya diskriminasi yang terjadi. Banyak cara yang diambil melalui legislasi khusus tetapi kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan kasta rendah tetap saja terjadi⁶. Jika keterwakilan perempuan di parlemen dapat memadai, mungkin saja diskriminasi terhadap perempuan akan berkurang, tetapi sayangnya jumlah

⁴ Atur Kohli, *The Success of India's Democracy*
<http://storage.globalcitizen.net/data/topic/knowledge/uploads/2011101085513705.pdf> diakses pada 4 November 2013

⁵ *Defining Democracy*, <http://www.ait.org.tw/infousa/zhtw/docs/whatsdem/whatdm2.htm>
Produced and maintained by the U.S. Department of State's Bureau of International Information Programs. Diakses pada 30 oktober 2013.

⁶ Sarbeswar Sahoo, *Democratic India in The Development Index 2004*
<http://www.countercurrents.org/sahoo170707.htm> diakses pada 5 Februari 2014

persentase perempuan di parlemen India belum memadai. Dengan jumlah kursi parlemen yang kurang dari duapuluh persen diduduki oleh perempuan, jelas bahwa partai politik harus berusaha dan berupaya untuk mendorong pemberdayaan perempuan dalam politik⁷.

Kurang terwakilinya perempuan di dalam parlemen menyebabkan munculnya aktivis-aktivis feminis dalam masyarakat maupun negara. Feminisme menurut Yubahar Ilyas adalah kesadaran kaum perempuan atas penindasan dan perlakuan tidak adil baik dalam keluarga maupun masyarakat serta tindakan untuk mengubah hal tersebut yang dilakukan oleh kaum laki-laki maupun perempuan itu sendiri⁸. Bagi penjelasan pentingnya studi tentang gender yang kini berkembang sebenarnya dimulai dari Amerika pada awal tahun 1970-an, ketika para sarjana hukum feminis mulai melancarkan protes terhadap hukum melalui pandangan yang didasarkan “pengalaman perempuan⁹”. Di India, dibawah pengaruh kolonial ide-ide feminis mulai menyebar, namun permasalahan yang diperhatikan hanya kepada kelas-kelas tertinggi Hindu dalam masyarakat yang mencakup kolonial elit¹⁰.

⁷Julie Balington, *Pemberdayaan Perempuan demi Partai Politik yang Lebih Kuat*, http://www.undp.org/content/dam/undp/library/gender/gender%20and%20governance/Bahasa%20Indonesia_Empowering_women_UNDP-NDI_4%202012.pdf diakses pada 4 Oktober 2013.

⁸Nur Shofwah, *Feminisme*, <http://www.scribd.com/doc/28956671/FEMINISME> diakses pada 30 oktober 2013.

⁹ Pengalaman perempuan diartikan sebagai pengalaman yang sebagaimana pengalaman tersebut ditempatkan dalam dokumen HAM dan Konvensi Menentang Penyiksaan atau Penghukuman Lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia dan relasinya dengan kekerasan terhadap perempuan. R. Valentina Sagala, *Pergulatan Feminisme dan HAM*. Hal 60.

¹⁰ Sarbani Guha Ghosal, Major Trend of Feminism in India. <http://www.jstor.org/stable/41856169> diakses pada 3 Oktober 2013.

India menganut demokrasi parlementer dua kamar dengan sistem multipartai, majelis rendah disebut Lok Sabha dan mejelis tinggi disebut Rajya Sabha, tetapi di dalam dua majelis tersebut keterwakilan perempuan masih dianggap kurang, persentasenyapun mengalami fluktuasi. Adanya status di bawah dan diskriminasi yang diberikan kepada perempuan dalam masyarakat India seperti dalam hubungan sosial, posisi politik dan kegiatan ekonomi turut memainkan peran penting dalam memperdalam adanya kesenjangan sosial¹¹. Keterwakilan perempuan dalam parlemen juga masih didomninsi oleh kaum laki-laki. Dapat kita lihat dari persentase perempuan dalam parlemen India sebagai berikut :

- a. **Lok Sabha:** pada tahun 1952 berjumlah 4,4%, pada tahun 1971 berjumlah 4,2%, pada tahun 1984 berjumlah 8,1%, pada tahun 1998 berjumlah 8,07%, dan pada tahun 2009 berjumlah 10,9¹².
- b. **Rajya Sabha:** pada tahun 1952 berjumlah 7,3%, pada tahun 1971 berjumlah 7%, pada tahun 1984 berjumlah 11,48%, pada tahun 1998 berjumlah 6,12%, pada tahun 2009 berjumlah 8,98%¹³.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengambil judul penelitian yakni **“Pengaruh Demokratisasi terhadap Keterlibatan Perempuan India di Parlemen”** dengan tujuan untuk memaparkan dan

¹¹ Dr. Manjunath Sadashiva, *Revitalizing Democracy and Participation in India: Recent National Policy Initiatives* <http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xbcr/SID-380F65A8-9E0CE423/bst/Manjunath%20Sadashiva.pdf> diakses pada 22 November 2013.

¹² Reservation of Seats for Women in Legislative Bodies: Perspectives.

http://rajyasabha.nic.in/rsnew/publication_electronic/reserv_women_pers2008.pdf

¹³Ibid hal 5.

mengetahui bagaimana demokratisasi dapat mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam parlemen.

1.2 Rumusan Masalah

Penulisan karya ilmiah perlu adanya sebuah perumusan masalah sebagai bentuk penentuan masalah utama yang akan dijelaskan dan menunjukkan sejauh mana permasalahan tersebut menjadi penting untuk diangkat. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

Bagaimana pengaruh demokratisasi terhadap keterlibatan perempuan India di parlemen?

1.3 Penelitian Terdahulu

Peneliti berusaha untuk menyajikan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya yang meliputi jurnal dan buku yang memiliki kesamaan tema. Penelitian terdahulu disajikan dengan tujuan untuk mencari perbandingan hasil serta orisinalitas penelitian.

Penelitian terdahulu yang pertama adalah *Obstacles to Women's Participation in Parliament* oleh Nadezhda Shvedova¹⁴. Pada tingkat sosial politik, keterwakilan perempuan di parlemen begitu kurang, pada tahun 2005 hampir 16% kursi yang dipegang oleh perempuan. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan berdasarkan kelas, ras etnis, latar belakang budaya dan

¹⁴Nadezhda Shvedona, *Obstacles to Women's Participation in Parliament*, http://www.idea.int/publications/wip2/upload/2.%20Obstacles_to_Women's_participation_in_Parliament.pdf diakses pada 22 November 2013.

pendidikan. Tidakterwakilinya perempuan di dalam parlemen menjadikan kemungkinan prinsip-prinsip demokrasi dalam masyarakat tidak terwujud, serta mengecilkan pencapaian kesetaraan gender.

Pada abad 20 perempuan mendapatkan akses untuk mendapatkan hak politik, ekonomi, dan sosial. Hal tersebut merupakan perubahan yang sangat berarti bagi kaum perempuan, namun meskipun sebagian perempuan telah berhasil memerangi diskriminasi, kesenjangan di daerah lain masih tetap berlanjut. Hingga pada abad 21 pun kaum perempuan harus masih tetap berjuang melawan kesenjangan tersebut. Hal tersebut disebabkan sebagian besar di pemerintahan telah didominasi oleh laki-laki. Oleh karena itu langkah-langkah tindakan positif harus diambil untuk menjamin representasi perempuan dalam masyarakat dan pemerintahan.

Penelitian yang kedua yaitu berjudul *Democracy in India – The State-Institutional Domain* oleh Shefali Jha¹⁵. Di India, menurut Majelis Konstitusi, kewarganegaraan India memiliki dua prinsip yaitu *lex sanguis* dimana kewarganegaraan ditentukan oleh darah dan ras, terlepas dari tempat kelahiran, dan *lex soli* dimana kewarganegaraan ditentukan atas dasar kelahiran. Masyarakat demokratis seharusnya dapat hidup bersama dengan masyarakat lain, terikat satu sama lain terlepas dari klasifikasi kelas, kasta, dan agama. Tetapi di India masih terjadi kesenjangan yang sangat tinggi di tingkat masyarakat. Dalam politikpun masih ada stratifikasi sosial karena melekatnya unsur budaya. Reformasi kelembagaan Indiapun menjadi

¹⁵ Shefali Jha, *Democracy in India – The State-Institutional Domain* <http://www.democracy-asia.org/qa/india/Shefali%20Jha.pdf> diakses pada 4 november 2013.

perdebatan, dan domain kelembagaan negara India megnungkapkan bahwa banyak yang bermasalah tentang lembaga-lembaga politik di India. Permasalahan dalam kerja legislatif dan eksekutif menjadikan tersumbatnya upaya untuk membentuk peradilan dalam politik India.

Penelitian terdahulu yang ketiga yaitu studi kasus yang berjudul **Kelas, Kasta, dan Gender : Perempuan dalam Parlemen di India**, oleh Shirin Rai¹⁶. Dalam studi kasusnya ini Shirin membahas tentang kesulitan yang dialami oleh perempuan India untuk masuk ke dalam dunia politik. Politisi perempuan sendiri mengatakan bahwa dalam partai politik pun, amat jarang ditemukan wanita di dalamnya. Hal tersebut telah menjadi isu bagi gerakan-gerakan feminis di negara tersebut. Isu kuota parlemen yang tumpang tindih antara kuota perempuan dari kasta rendah dengan elitisme, sebagian besar kelompok merasa bahwa hal tersebut dapat memecah belah kaum perempuan. Mereka juga khawatir mengenai pemberian hak-hak istimewa kepada perempuan elite dengan menjamin kursi bagi mereka di parlemen.

Pada periode 1991-1996 sebagian besar wakil parlemen perempuan berasal dari kalangan kelas menengah, banyak di antara mereka memasuki dunia politik melalui hubungan keluarga, sebagian melalui gerakan-gerakan mahasiswa, dan sebagian lagi merupakan hasil prakarsa negara yang bertujuan untuk meningkatkan representasi dari kasta-kasta rendah. Dalam parlemen, perempuan-perempuan yang memiliki jabatan tinggi berasal dari

¹⁶ Studi kasus penelitian oleh Shirin Rai, *Kelas, Kasta, dan Gender : Perempuan dalam Parlemen di India*, <http://www.idea.int/publications/wip/upload/CS-India.pdf> hal. diakses pada 17 Juni 2013.

kalangan elite dan memiliki latar belakang terdidik, dan memperoleh dukungan dari keluarga mereka. Jadi, mayoritas perempuan dalam parlemen India adalah perempuan-perempuan dari kalangan elite, posisi kelas mereka sendiri lebih memiliki peluang yang besar untuk masuk ke dalam kancah politik daripada perempuan-perempuan yang berasal dari kasta rendah.

Yang ke empat adalah yaitu jurnal penelitian yang berjudul *Feminism and Democracy Renewal* yang ditulis oleh Tess Lenning¹⁷. Dia sering mengatakan bahwa aspirasi dan kesempatan bagi perempuan terus meningkat selama abad terakhir. Pendidikan dan kesempatan kerja bagi perempuanpun juga sudah terbuka tidak seperti dulu. Protesnya para feminis dan organisasi-organisasi perempuan telah menjadikan adanya tindakan untuk melindungi hak-hak dan mencegah kekerasan terhadap perempuan.

Pemikiran konservatif mendefinisikan feminisme sebagai penunjang hak yang sama dan kesempatan bagi perempuan. Banyak politisi yang menarik perempuan untuk diberikan posisi kekuasaan politik agar kaum muda perempuan dapat menghadapi dominasi laki-laki. Oleh karena itu, daya perempuan juga merupakan model perubahan politik. Feminis liberal, radikal, maupun sosialis memiliki tujuan yang sama yaitu memperjuangkan kesetaraan. Mereka mendapatkan keberhasilan meskipun mengalami fase yang lama, yaitu pada pergeseran sikap seksisme,

¹⁷ Tess Lenning, *Feminism and Democracy Renewal*, <http://www.lwbooks.co.uk/journals/soundings/pdfs/s52lanning.pdf> diakses pada 1 November 2013.

kekerasan dalam rumah tangga, dan peran gender. Gerakan feminis secara eksplisit berusaha untuk mengatur dan melibatkan perempuan dari semua segi latar belakang dalam perubahan sosial.

Dengan adanya krisis keuangan global menjadikan negara memperbaharui demokrasi kapitalisme mereka. Begitu juga feminis harus melawan perubahan agar dapat memasukkan kepentingan politik mereka di setiap pembaharuan. Hal tersebut menjadikan feminis tidak hanya membahas jenis kelamin, tetapi pemahaman dimana laki-laki dan perempuan dari berbagai latar belakang yang tertindas memiliki pemahaman untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Penelitian terdahulu yang terakhir adalah artikel Sumati Arora yang berjudul *Democracy in India: A Success or Failure?*¹⁸, menurut Samuel Huntington, demokrasi India merupakan sebuah institusi yang menghadapi krisis menjelang kemerdekaannya seperti krisis integrasi nasional, krisis identitas, krisis legitimasi, dll. India pada saat baru merdeka begitu banyak menghadapi tantangan dalam memperjuangkan demokrasi. Apalagi dengan masalah utamanya tentang adanya sistem kasta, kemiskinan, dan buta huruf.

Setelah bertahun-tahun India penuh gejolak, demokrasi di India masih saja dalam bentuk unik. Karena masih adanya sistem kasta di dalamnya, yaitu untuk kelas yang istimewa dari masyarakat itu akan berarti kebebasan untuk perusahaan dan yang lebih rendah berarti

¹⁸Sumati Arora, *Democracy in India: A Success or Failure?* <http://theviewpaper.net/democracy-in-india-a-success-or-failure/> diakses pada 27 Maret 2012.

kesetaraan (setidaknya antara masyarakat) dan perwakilan. India merupakan negara yang memiliki komitmen dalam untuk sistem demokrasi dan nilai-nilai demokrasi memberikan dorongan terhadap perubahan dan melihat perjuangan kontemporer dan gerakan rakyat sebagai bagian dari proses demokrasi.

Tabel 1: tabel perbandingan penelitian terdahulu

No.	Nama/Judul Penelitian	Metodologi	Hasil
1.	Nadezhda Snvedova/Kendala Partisipasi Perempuan di Parlemen	Deskriptif. Teori demokrasi dan kesetaraan gender.	Tidakterwakilinya perempuan dalam sosial-politik dikarenakan adanya perbedaan berdasarkan kelas, ras, etnis, latar belakang budaya dan pendidikan. Meskipun sebagian perempuan telah berhasil memerangi diskriminasi, namun di daerah lain masih banyak terjadi diskriminasi terhadap perempuan.
2.	Shefali Jha/ <i>Democracy in India – The State–Institutional Domain</i>	Teori kebudayaan dan stratifikasi sosial.	Kesenjangan dalam politik disebabkan oleh adanya perbedaan kasta, kelas, dan ras. Budaya tersebut yang menyebabkan adanya stratifikasi sosial dan permasalahan dalam pemerintahan. Oleh karena itu pemerintah India masih berusaha menyelesaikannya.
3.	Shirin Rai/Kelas, Kasta,	Model penelitian:	Mayoritas perempuan

	dan Gender : Perempuan dalam Parlemen di India	deskriptif. Teori: Persamaan Gender.	dalam parlemen India adalah perempuan dari kalangan elite, karena mereka lebih memiliki peluang daripada perempuan dari kasta rendah.
4.	Sumati Arora/ Demokrasi India : Sebuah Kesuksesan atau Kegagalan.	Analisis demokrasi Samuel Huntington	Demokrasi di India merupakan bentuk yang unik, karena masih melekatnya sistem kasta. Demokrasi juga memberikan dorongan munculnya gerakan rakyat.
5.	Tess Lanning/ Feminisme dan Pembaharuan Demokrasi.	Deskriptif. Teori : kesetaraan gender	Feminisme berusaha masuk di setiap perubahan sosial politik negara agar mereka turut di dalamnya. Dengan adanya pebaharuan demokrasi akibat krisis global, kaum perempuan pada abad terakhir ini memiliki ruang dalam perpolitikan negara.
6.	Fike Nilam Sari/ Pengaruh Demokratisasi terhadap Keterlibatan Perempuan India di Parlemen	Deskriptif. Teori : Konsep demokratisasi, teori feminisme.	Ternyata meskipun India merupakan negara demokrasi yang besar, pemberdayaan perempuan dalam pemerintahan masih sangat kurang, hal tersebut dikarenakan adanya kasta dan budaya patriarki yang masih melekat pada masyarakatnya.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui demokratisasi di India dan posisi perempuan dalam parlemennya.
- b. Mengetahui pengaruh demokratisasi terhadap keterlibatan perempuan India dalam parlemen.
- c. Mengetahui hambatan yang menyebabkan demokratisasi tidak signifikan terhadap keterlibatan perempuan India di parlemen.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk :

1. Mahasiswa Hubungan Internasional yang ingin mencari gambaran secara umum bagaimana pengaruh demokratisasi terhadap keterlibatan perempuan India di parlemen.
2. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat mencari pembahasan-pembahasan yang baru yang belum sempat dibahas dalam penelitian ini.
3. Secara umum penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau bacaan tentang perkembangan feminisme di India.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Peringkat Analisa

Peneliti menggunakan level analisa deduksionis yang memiliki unit analisa atau variabel dependennya adalah demokratisasi suatu negara, sedangkan unit eksplanasinya adalah keterlibatan perempuan India di

parlemen. Alasan mengapa menggunakan analisa deduksionis karena adanya pengaruh dari demokratisasi terhadap perempuan (individu), dan penulis dapat menjabarkan pola perkembangan persentase terhadap keterlibatan perempuan India di parlemen.

1.6 Konsep Teori

1.6.1 Konsep Demokratisasi

Menurut Robert Dahl, ciri khas demokrasi adalah sikap tanggap pemerintah terhadap keinginan warganegaranya, dengan menggambarkan tatanan: seberapa tinggi tingkat kontestasi dan kompetisi yang dimungkinkan, serta seberapa banyak warganegara yang memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kesempatan tersebut¹⁹. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa demokrasi harus memberikan kesempatan yang sama terhadap warga negaranya untuk ikut serta dalam partisipasi politik, tidak memandang apapun, baik laiki-laki dan perempuan. Sedangkan demokratisasi menurut Dahl adalah jalan menuju sistem dimana kontestasi dan partisipasi publik sama-sama tinggi²⁰.

Demokrasi Prosedural atau demokrasi formal merupakan demokrasi yang lebih fokus pada institusi, struktur dan prosedur, sedangkan demokrasi Substantif lebih berpusat pada kondisi demokrasi

¹⁹ Mohtar Mas' oed, *Negara, Kapital dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003) hal. 16.

²⁰ Ibid hal. 17.

dan bagaimana mencapai tujuan yang nyata dalam demokrasi seperti kebebasan, kesetaraan ekonomi, dan keadilan yang sama²¹.

Demokrasi sosialis banyak yang beranggapan merupakan komunisme, tetapi pada pengertiannya tidak sama. Karena pada abad ke-19 banyak sosialis yang membedakan diri dari demokrasi sosial karena mereka tidak menerima demokrasi. Demokrasi sosialis lebih pada upaya untuk menerapkan kebijakan tertentu atau menjunjung nilai-nilai tertentu seperti kesejahteraan, kesetaraan dan solidaritas²².

Demokrasi Liberal menurut Jeremy Bentham dan James Mill terdapat perubahan antara liberalism ke dalam bentuk liberal demokrasi, dan jika keduanya digabungkan, liberalism menyangkut perekonomian kapitalis sementara liberal demokrasi berarti perjuangan untuk masyarakat dimana masing-masing memiliki kebebasan untuk mewujudkan aspirasinya²³. Jadi demokrasi liberal merupakan demokrasi yang berdasarkan pada pengakuan hak-hak kebebasan individu.

Pada dekade terakhir, banyak negara-negara besar bertransisi menuju negara demokrasi. Transisi tersebut mengalami proses yang sangat panjang karena negara-negara yang mengalami harus mengubah sistem pemerintahan yang lama menuju tatanan global. Pada masa sekarang ini, mayoritas negara-negara di dunia telah menggunakan sistem pemerintahan

²¹ Shalendra D. Sharma, *Development and Democracy in India* (Lynne Rienner Publisher, United State of America: 1999).

²² Sheri Berman, *Understanding Social Democracy*
<http://www8.georgetown.edu/centers/cdacs/bermanpaper.pdf> diakses pada 20 Desember 2014.

²³ Asher Horowitz, *Liberalism, Democracy and John Stuart Mill*
http://www.yorku.ca/horowitz/courses/lectures/39_mill_liberalism_democracy.html diakses pada 20 Desember 2014.

demokrasi. Tetapi terdapat ketidaksesuaian antara demokrasi dengan keadaan-keadaan sosial internal maupun eksternal negara-negara tersebut, masih banyak masyarakat yang mengalami ketidakadilan sosial seperti perbudakan, penganiayaan, bahkan kasus yang dapat menyebabkan kematian, serta hak-hak sipil dan politik.

Adanya struktur naotonomik²⁴ juga dapat menciptakan ketidakadilan sosial dalam masyarakat. Seperti halnya di India, perempuan tidak memiliki hak yang sama dalam ranah perpolitikan negara, ketidakadilan sosial dalam masyarakatnya sendiri yang dialami perempuan, dan kurangnya penyebaran fasilitas untuk melahirkan, sehingga mengakibatkan angka kematian perempuan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, syarat pokok bagi kesejahteraan perempuan sebagai anggota masyarakat yang secara potensial adalah bebas dan sederajat, umumnya tidak ada, dan hal tersebut membuat adanya dominasi laki-laki dalam parlemen, keluarga dan kekerasan terhadap perempuan²⁵.

Dalam hukum publik yang demokratis memerlukan hal-hal seperti hak-hak sipil dan politik yang secara keseluruhan merupakan hak berbicara, kebebasan pers serta kebebasan memberikan suara dalam pemilihan umum. Sehingga masyarakat dapat memberi perintah terhadap

²⁴ Struktur naotonomi adalah struktur dimana hubungan kekuasaan secara sistematis menghasilkan ketidaksamaan kesempatan hidup yang menunjuk pada produksi dan distribusi kesempatan hidup yang tidak sama yang membatasi dan menghilangkan kemungkinan-kemungkinan partisipasi politik. David Held, *Demokrasi dan Tatanan Global*. (2004. Yogyakarta: Pustaka Pelajar) Hal. 211.

²⁵ Ibid hal 220

diri mereka sendiri melalui wakilnya di pemerintahan yang berasal dari hak untuk pemerintahan yang demokratis.

Dalam pemerintahan dan masyarakat yang demokratis terdapat hak-hak khusus yang terkait meliputi pemeliharaan anak dan pendidikan universal, yang tidak memandang kelas, suku, gender, dan usia. Hak-hak tersebut juga merupakan syarat utama bagi penegakan kesempatan yang sama pada kaum perempuan untuk memasuki pekerjaan non-rumah tangga dan kerangka kerja perhimpunan kewarganegaraan dan kehidupan politik yang lebih luas²⁶.

1.6.2 Teori Feminisme

Dengan adanya demokratisasi, maka semakin terbuka bagi kaum feminis untuk memperjuangkan hak mereka, entah itu melalui gerakan feminis yang terorganisir atau tidak, maupun melalui LSM. Pada teori feminisme, terdapat beberapa periode yaitu adanya feminisme gelombang pertama, feminisme gelombang kedua, postfeminisme, dan feminisme gelombang ketiga. Pada feminisme gelombang pertama, para perempuan lebih bertujuan pada persamaan gender. Pada gelombang kedua, mereka sudah mulai membela hak mereka dalam hal ekonomi, gaji, dan politik. Dan yang terakhir adalah feminisme gelombang ketiga yang lebih modern dan luas cakupannya.

²⁶ Ibid hal. 243

Feminisme gelombang ketiga muncul dengan terbitnya buku yang ditulis oleh Germaine Greer pada tahun 1999 yang berjudul *The Whole Woman*, yaitu buku sambungan dari feminisme gelombang kedua. Dalam bukunya, Greer menyatakan bahwa buku yang ditulisnya merupakan reaksi dalam melawan postfeminisme²⁷. Penerbitan buku ini juga menjelaskan bahwa perdebatan mengenai masa depan feminisme belum berakhir, feminisme gelombang kedua masih belum mati.

Seperti halnya ideologi-ideologi lain, feminisme juga harus menyesuaikan diri untuk merespons keadaan darurat perubahan dunia, meskipun juga kegagalan dalam menyelamatkan gerakan ini pada perempuan muda harus diperhatikan²⁸. Tetapi, seiring perkembangan waktu, gerakan feminisme ini mungkin akan mendapatkan jalan untuk mengakomodasi diri. Gerakan feminisme merupakan salah satu hasil dari gerakan sosial, dimana gerakan sosial sering diidentikkan dengan masalah politik, karena memang gerakan sosial lahir dari sebuah kepentingan individu atau kelompok masyarakat baik terorganisir maupun tidak²⁹.

Jumlah kelompok perempuan gelombang ketiga berkembang pesat di AS. Editor dari buku *The Third Wave Agenda*, Lesli Heywood dan Jennifer Drake, mengemukakan bahwa perbedaan mendasar antara feminisme gelombang kedua dengan gelombang ketiga adalah bahwa feminisme gelombang ketiga dengan lancar merasakan kontradiksi, oleh

²⁷ Sarah Gamble, *Pengantar Memahami Feminisme dan Postfeminisme* (Yogyakarta: Jalasutra 2004) Hal. 63.

²⁸ Ibid hal 64

²⁹ Nanang Martono, *Sosiaologi Perubahan Sosial, Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial* (Bandung: Nusa Media 2011) hal. 223.

karena itu mereka telah dididik dalam persaingan struktur feminis, mereka menerima pluralisme sebagai takdir³⁰.

Spesifikasi pada teori ini adalah feminisme liberal yang akar teorinya bertumpu pada kebebasan dan kesetaraan rasionalitas. Menekankan hak-hak individu dan kebebasan yang sama bagi perempuan dan laki-laki serta mengecilkan perbedaan seksual. Feminisme liberal berakar dalam tulisan-tulisan yang salah satunya adalah Mary Wollstonecraft dengan karyanya yang berjudul *A Vindication of the Rights of Man*, dikembangkan dari filsafat politik liberal, dengan alasan bahwa melalui hukum dan politik, perempuan dapat mengubah hukum dan politik sehingga akan dapat mencapai keadilan gender³¹. Menurut Wollstonecraft, perbedaan dua jenis kelamin tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk pembagian perbedaan hak dan peran. Misalnya saja dalam hal pendidikan, keduanya harus dididik untuk meningkatkan rasionalitas mereka sebagai kemampuan untuk bertindak dan bertanggungjawab penuh terhadap moral mereka.

Feminis liberal fokus pada negara ideal dimana negara tersebut menghormati semua warganya sehingga dapat melindungi hak dan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Feminis liberal tidak menuntut adanya perubahan, tetapi lebih pada

³⁰ Ibid hal 64

³¹ Katharine Sarikakis, *Feminist Theory and Research*

<http://homepage.univie.ac.at/katharine.sarikakis/wp-content/uploads/2011/09/Feminist-Theory-and-Research1.pdf> diakses pada 26 November 2014.

reformasi norma dan sistem yang ada sehingga dapat mencakup peran perempuan yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan bagi perempuan di ruang publik. Jadi, dalam pandangan feminisme liberal, perempuan adalah makhluk rasional, memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki, sehingga harus diberi hak yang sama pula dengan laki-laki. Tetapi, permasalahannya terletak pada kebijakan negara yang bias gender. Gender seringkali identik dengan perempuan, padahal sebenarnya gender adalah permasalahan bersama yaitu laki-laki dan perempuan, karena menyangkut peran, fungsi, dan hubungan antara keduanya baik di lingkungan domestik maupun publik. Seperti halnya di India, gerakan perempuan menuntut persamaan hak dengan laki-laki, tetapi pemerintah lebih cenderung memilih laki-laki untuk berada di parlemen.

Kesetaraan gender bukan merupakan melakukan perlawanan terhadap laki-laki ataupun menentang kodrat sebagai perempuan. Secara biologis kodrat perempuan dan laki-laki jelas berbeda dan bersifat tetap, tetapi secara konstruksi sosial kodrat tersebut dapat berubah. Kodrat yang dihasilkan dari interpretasi sosial dan simbolik memiliki perbedaan yang bersifat tidak kekal, sangat mungkin untuk berubah dan berbeda-beda, serta non-kodrati yang bersifat relatif, tidak berlaku umum, perannya dapat berubah dan dipertukarkan, atau dikenal sebagai gender yang merupakan konsep sosial menurut Sadli dan Patmonodewo³².

³² Dr. Umi Sambulah, *Gender dan Demokrasi* (2008. Malang: Averroes Press) hal. 4.

Oleh karena itu, pada abad 18 muncul tuntutan agar perempuan mendapat pendidikan yang sama, pada abad 19 para perempuan memperjuangkan kesempatan hak sipil dan ekonomi, dan abad 20 banyak organisasi-organisasi perempuan yang bermunculan untuk menentang diskriminasi bidang politik, sosial, ekonomi, maupun personal. Pengalaman perempuan memiliki sedikit pengaruh terhadap praktek atau pemikiran demokrasi, karena ide-ide feminis telah menjadi perdebatan yang muncul atas sifat politik demokratis³³.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif. Penulis berusaha untuk menjelaskan bagaimana pengaruh demokratisasi terhadap keterlibatan perempuan India di parlemen.

1.7.2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka atau *library research* untuk mengumpulkan data. Sumber data diambil dari buku-buku, dokumen-dokumen dan jurnal-jurnal, serta dilengkapi dengan informasi yang didapat dari internet, majalah, dan surat kabar.

1.7.3. Teknik Analisa Data

Teknik analisa ini menggunakan data kualitatif yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber, yaitu

³³ Jane Mansbridge, *Feminism and Democracy*, <http://prospect.org/article/feminism-and-democracy> diakses pada 26 November 2013.

pengumpulan data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dengan data yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Selanjutnya adalah menyusun satuan-satuan data yang kemudian dirangkai sedemikian rupa hingga menjadi suatu kalimat dan paragraf yang utuh. Dan tahap terakhir dalam penelitian ini yaitu mengadakan keabsahan data.

1.7.4. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian difokuskan pada perkembangan persentase keterlibatan perempuan dalam parlemen di India. Bagaimana demokratisasi dapat mempengaruhi emansipasi dan persamaan gender terhadap perempuan dalam perpolitikan dan parlemen India.

1.7.5. Batasan Materi

Batasan materi menunjukkan ruang sebuah peristiwa yakni cakupan kawasan dan gejala atau daerah studi. Adapun batasan materi dalam penulisan ini adalah penulis akan mengulas tentang perkembangan persentase keterlibatan perempuan India di parlemen yang dipengaruhi oleh demokratisasi serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro terhadap perempuan.

1.7.6. Batasan Waktu

Berdasarkan pemaparan dan data yang ada, batasan waktu yang menjadi titik fokus dalam penulisan ini adalah pada tahun 1952-2013. Karena pada tahun 1952 hingga 2013 demokrasi di India masih prosedural dan keterwakilan perempuan di parlemen India dianggap masih relatif rendah.

1.8 Asumsi Dasar

Dalam perkembangannya, demokratisasi memiliki pengaruh yang relatif signifikan terhadap keterlibatan perempuan India di parlemen. Hal itu ditandai dengan adanya peningkatan persentase meskipun hanya beberapa persen dari tahun ke tahun. Signifikansi tersebut juga dikarenakan adanya gerakan feminisme yang melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan jumlah kandidat perempuan di parlemen. Oleh karena itu, gerakan feminisme tersebut dapat mempengaruhi pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang pro terhadap perempuan India.

1.9 Struktur Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan merupakan pengantar dari keseluruhan penulisan skripsi yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, penelitian terdahulu, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran/peringkat analisa, konsep teori, metodologi penelitian, asumsi dasar.

BAB II DINAMIKA DEMOKRATISASI DI INDIA

Bab ini berisi tentang bagaimana dinamika demokratisasi di India mulai dari awal disahkannya konstitusi pada tahun 1950 dan dilaksanakannya pemilihan umum yang pertama pada tahun 1952 dengan Perdana Menteri Jawaharlal Nehru hingga pemerintahan pada saat ini dengan pemerintahan Dr. Manmohan Singh.

BAB III DINAMIKA GERAKAN PEREMPUAN INDIA DAN PENINGKATAN JUMLAH PEREMPUAN DI PARLEMEN

Pada bab ini berisi tentang perkembangan gerakan feminisme di India sehingga mereka dapat mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam parlemen serta persentase perempuan India di pemerintahan, yaitu pada dua majelis negara yang terdiri dari Lok Sabha dan Rajya Sabha, serta menunjukkan kebijakan-kebijakan apa saja yang pro perempuan.

BAB IV KESIMPULAN

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran tentang pengaruh demokratisasi terhadap keterlibatan perempuan India di parlemen..